

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alinea 4 dinyatakan bahwa negara bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Upaya mewujudkan tujuan tersebut, setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pengajaran seperti tercantum pada Pasal 31 ayat 1 UUD 1945 (Fattah, 2004: 2). Secara operasional, implementasinya tertuang dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bab IV ayat 5 yang menyebutkan : "Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu".

Menurut Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa:

"Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab".

Hal itu menunjukkan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Salah satu misi mewujudkan visi bangsa Indonesia masa depan ialah mewujudkan sistem dan iklim pendidikan nasional yang demokratis dan bermutu guna memperteguh akhlak mulia, kreatif, inovatif, berwawasan kebangsaan,

cerdas, sehat, berdisiplin dan bertanggungjawab, berketerampilan serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka mengembangkan kualitas manusia Indonesia. Visi yang terkandung dalam RPJP tersebut menyiratkan bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

Dalam konteks sistem pendidikan di Indonesia, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, antara lain dinyatakan bahwa pendidikan kejuruan merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja dalam bidang tertentu. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Pasal 3, ayat 2, antara lain dinyatakan bahwa Pendidikan Menengah Kejuruan mengutamakan penyiapan siswa untuk memasuki lapangan kerja serta mengembangkan sikap profesional.

Jabaran lebih lanjut tentang sekolah menengah kejuruan dituangkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0490/U/1992, antara lain disebutkan bahwa tujuan Sekolah Menengah Kejuruan adalah : "untuk meningkatkan kemampuan siswa untuk dapat mengembangkan diri sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi"

Mengacu kepada Undang-Undang, Peraturan Pemerintah serta Keputusan Menteri Pendidikan tersebut diatas, maka akar pendidikan menengah kejuruan sesungguhnya adalah lapangan kerja bagi tamatannya. Untuk mencapai tujuan

tersebut, maka pendidikan menengah kejuruan tidak dapat dipisahkan dari Dunia Usaha/Dunia Industri/Dunia Kerja sebagai institusi penyerap tenaga kerja. Oleh karena itu pendidikan menengah kejuruan hendaknya dirancang, dilaksanakan, dimonitor, dan dievaluasi secara terkait (*link*) dengan Lapangan kerja (DU/DI). sehingga hasilnya benar-benar sesuai, cocok atau sepadan (*match*) dengan tuntutan dan kebutuhan Dunia Usaha/Dunia Industri/Dunia Kerja (Hadiwaratama, 2002: 21).

Untuk mampu mencapai kualifikasi dan kompetensi tersebut, maka Sekolah Menengah Kejuruan perlu merancang kegiatan konkrit yang relevan dengan kebutuhan siswa ketika belajar dan setelah lulus kelak. Salah satu bentuk kegiatan yang relevan dimaksud adalah pelaksanaan pembelajaran kelompok produktif. Meskipun jenis kelompok produktif pada tiap jenjang SMK tidak seragam, dalam arti setiap SMK mengembangkan kelompok produktif sesuai dengan kekhususannya, namun pengembangan pembelajaran kelompok produktif tersebut dapat dijadikan sebagai sarana untuk memberi bekal praktis dan sekaligus merupakan *value added* yang mampu memberi kontribusi pada efektivitas dan efisiensi baik internal maupun eksternal.

Sebagai sebuah sistem sosial yang terbuka (*open system*), Sekolah Menengah Kejuruan. tidak akan bisa lepas dari keadaan atau apa yang terjadi dalam masyarakat. Pendidikan adalah dari, oleh dan untuk masyarakat, artinya keberadaan institusi pendidikan memang dibutuhkan oleh masyarakat dalam rangka tetap berlangsungnya (*survive*) suatu komunitas. Di sisi lain Sekolah Menengah Kejuruan sebagai lembaga pendidikan akan tetap mampu bertahan untuk mengemban tugas yang diberikan oleh masyarakat apabila masyarakat ikut mendukung dalam arti luas terselenggaranya sebuah lembaga pendidikan (Zamroni, 2000: 41).

Dalam konteks perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam

masyarakat Indonesia dewasa ini, lembaga pendidikan dituntut untuk menunjukkan peran dan kemampuannya sebagai institusi yang mampu "memasok" sumber daya manusia untuk kebutuhan masyarakat. Fenomena yang berkembang atau bahkan tuduhan yang dialamatkan kepada lembaga pendidikan dewasa ini adalah kurang mampunya lembaga pendidikan menyiapkan sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh masyarakat, dalam hal ini pasar kerja terutama dunia industri. Ketidakmampuan ini dikandung pengertian tidak adanya kesesuaian kualifikasi antara *output* pendidikan dengan realitas tuntutan dunia industri yang sangat maju dengan pesatnya. Keadaan seperti ini oleh Zamroni (2000: 45) disebut dengan *external in-efficiency*.

Berkaitan dengan hal tersebut maka paradigma peran pendidikan, harus bersifat Sistemik Organik yang menekankan bahwa proses pendidikan formal harus memiliki ciri-ciri :

(1) lebih menekankan pada proses belajar mengajar, (2) diorganisir dalam struktur yang fleksibel, (3) memperlakukan peserta didik sebagai individu yang memiliki karakteristik khusus dan mandiri, dan (4) merupakan proses yang berkesinambungan dan senantiasa berinteraksi dengan lingkungan. Dengan paradigma ini pendidikan dituntut untuk memiliki sifat *double track*, yaitu pendidikan merupakan suatu proses yang tidak bisa dilepaskan dan perkembangan dan dinamika masyarakat (Zamroni. 2000: 44).

Persoalan yang dihadapi oleh lembaga pendidikan dewasa ini terutama bila dikaitkan dengan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagai *vocational education*, maka persoalan yang dihadapi akan semakin pelik dan kompleks terutama bila mengacu konsep pendidikan kejuruan itu sendiri. Menurut *House Committee on educational and labour* sebagai mana dikutip oleh Hamalik (2000: 24), pendidikan kejuruan adalah suatu bentuk pengembangan bakat, pendidikan dasar keterampilan dan kebiasaan-kebiasaan yang mengarah pada dunia kerja

yang dipandang sebagai latihan keterampilan.

Pendidikan kejuruan mempunyai tiga fungsi pokok, sebagai berikut: (1) fungsi pengembangan bakat, (2) fungsi pendidikan dasar keterampilan dan kebiasaan yang mengarah pada dunia kerja, dan (3) fungsi kepelatihan. Fungsi ketiga ini merupakan perpaduan antara fungsi pertama dan kedua, sehingga pendidikan kejuruan ini harus mampu memberikan pelayanan terhadap macam-macam kebutuhan untuk memperoleh pengalaman melalui pendidikan (Hamalik, 2000: 45).

Program kejuruan pada sekolah-sekolah menengah umumnya mencakup bidang pelayanan (*area service*) dalam spektrum yang luas, akan tetapi program-program sekolah kejuruan sekarang harus dapat menyediakan program yang lebih baik daripada sekolah kejuruan maupun sekolah-sekolah khusus (Weber, 2001: 4). Program-program yang ada, dan yang direncanakan untuk masa depan tanpa memandang jenis sekolah, harus didasarkan pada pertimbangan yang seksama secara cermat tentang kecenderungan (*trend*) dalam masyarakat di masa yang akan datang. Para administrator atau pengelola sekolah kejuruan harus berperan sebagai penggagas atau inovator dalam merancang masa depan lembaga yang mereka kelola. Strategi-strategi baru yang inovatif harus dikembangkan untuk memastikan bahwa lembaga pendidikan akan melaksanakan tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan masyarakat mendatang khususnya pada abad 21 dan setelahnya.

Pelaksanaan pembelajaran kelompok produktif tersebut relevan dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0490/U/1992, dinyatakan bahwa pola pembelajaran vokasional di SMK bertujuan untuk :

1. Memberi kesempatan pada siswa dan guru mengerjakan pekerjaan praktek yang berorientasi pada pasar.
2. Pengembangan wawasan siswa dan guru dalam kewiraswastaan.
3. Meningkatkan pendayagunaan sumber daya pendidikan yang ada di sekolah.
4. Meningkatkan kreativitas siswa dan guru.

Berdasarkan *pre-survey* yang dilakukan oleh penulis pada beberapa SMK negeri maupun swasta ada gejala umum yang sekaligus menjadi kendala utama pelaksanaan pembelajaran kelompok produktif, yang meliputi : (1) kurangnya permodalan, (2) lemah dan atau kurangnya sumber daya manusia pengelola, (3) lemahnya manajemen pengelolaan, (4) adanya kendala psikologis bagi para guru dan murid untuk melaksanakan tugas secara terus menerus. Kondisi demikian tentunya kurang menguntungkan bila dikaitkan dengan kesiapan siswa yang akan terjun dalam pasar kerja.

Adapun hasil survey di SMK Negeri 1 Karanganyar menunjukkan bahwa meski terdapat kendala, namun pihak sekolah telah berupaya mengembangkan strategi yang memungkinkan kelompok produktif khususnya penjualan dapat dijadikan sebagai sarana untuk mengembangkan kemampuan siswa. Selain pertimbangan dimilikinya minimarket yang dikelola pihak sekolah sekaligus sebagai tempat praktek, kelompok produktif penjualan di SMK Negeri 1 Karanganyar menjadi kelompok andalan sekolah tersebut dalam rangka menarik animo peserta didik untuk sekolah di SMK tersebut.

Untuk mengetahui dan mengkaji secara ilmiah pelaksanaan pembelajaran kelompok produktif penjualan khususnya SMK Negeri 1 Karanganyar maka penulis mencoba untuk meneliti fenomena yang ada dan sekaligus kendala yang dihadapi. Penelitian ini terutama difokuskan pada strategi pengelolaan

pembelajaran untuk mata pelajaran praktek dikaitkan dengan kesiapan kerja siswa dengan mengambil judul : **STRATEGI PENGELOLAAN PEMBELAJARAN KELOMPOK PRODUKTIF PENJUALAN (Studi Situs pada SMK Negeri 1 Karanganyar).**

### **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah, maka fokus penelitian ini adalah strategi pengelolaan pembelajaran kelompok produktif penjualan. Adapun fokus penelitian ini dirinci menjadi 3 sub fokus sebagai berikut :

1. Strategi perencanaan kegiatan kelompok produktif penjualan.
2. Strategi pelaksanaan kegiatan kelompok produktif penjualan.
3. Strategi untuk mengevaluasi kegiatan kelompok produktif penjualan.

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan strategi perencanaan kegiatan kelompok produktif penjualan.
2. Mendeskripsikan strategi pelaksanaan kegiatan kelompok produktif penjualan.
3. Mendeskripsikan strategi untuk mengevaluasi kegiatan kelompok produktif penjualan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini di harapkan memiliki signifikansi teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki sumbangan teoritis dalam khasanah pengetahuan dalam proses pembelajaran khususnya tentang strategi pengelolaan pembelajaran.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai masukan informasi bagi pihak sekolah mengenai pentingnya strategi pengelolaan pembelajaran yang efektif.
- b. Bagi *stakeholders* pendidikan, sebagai bahan kaji untuk rujukan pengambilan keputusan, terutama yang terkait langsung dengan persoalan kegiatan belajar mengajar di sekolah dalam upaya peningkatan mutu pendidikan.

#### **E. Definisi Istilah**

1. Strategi dalam pelaksanaan, merupakan upaya bagaimana mencapai tujuan atau sasaran yang ditetapkan sesuai dengan keinginan
2. Pengelolaan pembelajaran merupakan kegiatan yang dirancang untuk memberikan pengalaman pembelajaran yang melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi antar peserta didik, peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya dalam rangka pencapaian kompetensi dasar.
3. Kelompok produktif penjualan merupakan salah satu jurusan SMK Kejuruan yang memiliki kekhususan keahlian lulusan dalam bidang penjualan.